

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Salah satu masalah gizi buruk yang terjadi di Indonesia yaitu *stunting*. *Stunting* menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan menurunnya kemampuan produktivitas negara (Trihono et al., 2015). Selain itu, masalah *stunting* juga sangat berbahaya karena dapat menyebabkan tidak tercapainya target pembangunan nasional dan menimbulkan risiko beban yang signifikan yang harus ditanggung oleh negara pada akhirnya (Priyono, 2020).

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh atau tumbuh kembang anak tidak sesuai dengan usia nya akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sedangkan dalam jangka panjang, dampak *stunting* bagi anak menyebabkan anak menjadi kesulitan belajar dan konsentrasi, penyakit jantung, dan penyakit berbahaya lainnya. Menurut Ramayulis dkk. (2018), beberapa faktor dapat menyebabkan *stunting*, termasuk praktik pengasuhan gizi yang buruk yaitu termasuk kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan dan nutrisi sebelum kehamilan, selama kehamilan, dan setelah melahirkan. Namun, menurut Batiro et al. (2017), beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan *stunting* adalah sebagai berikut: penyakit infeksi, seperti diare dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA); penundaan pemberian ASI; tidak melakukan imunisasi; kekurangan makanan hewani; dan sumber air yang tidak aman.

Gambar 1.1 Kondisi anak yang mengalami *stunting*



Sumber: Dokumentasi Penulis

Stunting sendiri sudah menjadi masalah global dan bukan hanya menjadi masalah di Indonesia saja. Angka *stunting* di Indonesia mencapai 26,92% pada tahun 2020, turun menjadi 24,4% pada tahun 2021, dan 21,6% pada tahun 2022 (<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id>). Namun, meskipun mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga 2022, angka tersebut tetap tinggi karena masih jauh dari ambang batas dan tidak boleh melebihi yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) yaitu sebesar 20%.

Stunting ini dirasa memiliki efek yang sangat fatal, maka masalah ini harus ditangani dengan serius. Angka risiko morbiditas (angka kesakitan) dan mortalitas dapat meningkat sebagai akibat dari jangka pendek masalah *stunting* ini. Namun, dampak jangka menengah adalah penurunan kemampuan kognitif dan intelektual. Hasil penelitian OECD PISA (*Organization for Economic Cooperation and Development—Programme for International Students Assessment*) menunjukkan bahwa anak-anak dengan pertumbuhan normal

memiliki sel otak yang berkembang baik dengan cabang sel yang panjang, sementara anak-anak *stunting* memiliki perkembangan sel otak yang terbatas, yang berarti mereka bercabang secara tidak normal dan memiliki cabang sel yang lebih pendek daripada anak-anak dengan pertumbuhan normal. karena itu berdampak pada tingkat kecerdasan anak. Dampak jangka panjang dari *stunting* termasuk penurunan kualitas sumber daya manusia dan risiko penyakit degeneratif di masa dewasa (Ipan, I., Purnamasari, H., & Priyanti, E. , 2021).

Stunting sebaiknya dicegah dari masa remaja. Meskipun masa remaja bukanlah masa utama pencegahan *stunting*, remaja tetap memiliki peran penting dalam mendukung upaya pencegahan *stunting* terutama jika mereka berencana untuk menjadi orang tua di masa depan. Hal yang bisa dilakukan sedari remaja untuk mengantisipasi terjadinya *stunting* pada keturunannya di masa yang akan datang adalah dengan memahami pentingnya gizi dan kesehatan, menjaga pola makan dan gaya hidup yang sehat, dan banyak belajar mengenai pencegahan *stunting* sebelum terlambat.

Secara keseluruhan, walaupun pencegahan *stunting* lebih berfokus pada periode awal kehidupan anak, pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki remaja tentang gizi dan kesehatan berkontribusi besar pada upaya pencegahan *stunting* secara keseluruhan.

Menurunkan angka *stunting* saat ini menjadi agenda utama pemerintah Indonesia. Dibuktikan dengan dikeluarkannya peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*. Dalam peraturan presiden tersebut tercantum target yang harus dicapai pada tahun 2024 nanti yakni 14%

secara nasional. Target tersebut ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Percepatan penurunan *stunting* dilakukan secara multisektor oleh seluruh elemen Pemerintah Indonesia dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah termasuk pemerintah daerah.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENKO PMK), Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu lokus prioritas percepatan penurunan *stunting*. Pasalnya ada peningkatan kasus *stunting* di beberapa Kabupaten/Kota yang meningkat. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), pada tahun 2021 prevalensi *stunting* di Jawa Tengah sebesar 20,8%, sementara pada tahun 2022 prevalensi *stunting* naik menjadi 20,9%.

Kabupaten Boyolali menjadi salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami peningkatan angka *stunting*. Dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 1.1 Data sebaran *stunting* di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	Anak yang mengalami <i>stunting</i>		
		2021	2022	2023
1.	Cilacap	22,5%	22,1%	21,8%
2.	Banyumas	25,8%	23,7%	23,1%
3.	Purbalingga	19,5%	19,1%	16,8%
4.	Banjarnegara	20,3%	22,4%	19,5%
5.	Kebumen	21,8%	22,5%	21,3%
6.	Purworejo	19,5%	19,8%	19,1%

No	Kabupaten/Kota	Anak yang mengalami <i>stunting</i>		
		2021	2022	2023
7.	Wonosobo	20,1%	20,8%	20,3%
8.	Magelang	19,9%	19,1%	20,2%
9.	Boyolali	21,5%	22,1%	22,5%
10.	Klaten	22,8%	21,4%	22,2%
11.	Sukoharjo	16,4%	18,7%	17,5%
12.	Wonogiri	18,4%	14,9%	16,3%
13.	Karanganyar	16,8%	15,7%	15,1%
14.	Sragen	19,6%	19,2%	18,9%
15.	Grobogan	18,5%	18,2%	17,4%
16.	Blora	17,8%	18,9%	18,3%
17.	Rembang	19,5%	16,8%	17,9%
18.	Pati	16,9%	15,8%	15,9%
19.	Kudus	17,9%	16,8%	15,1%
20.	Jepara	22,9%	22,6%	21,8%
21.	Demak	21,7%	20,6%	20,1%
22.	Semarang	16,4%	18,7%	18,6%
23.	Temanggung	20,7%	20,5%	19,8%
24.	Kendal	20,8%	22,4%	22,1%
25.	Batang	20,3%	19,8%	17,4%
26.	Pekalongan	16,4%	16,2%	16,9%
27.	Pemalang	20,8%	22,1%	21,9%
28.	Tegal	20,8%	19,7%	19,1%

No	Kabupaten/Kota	Anak yang mengalami <i>stunting</i>		
		2021	2022	2023
29.	Brebes	28,1%	29,1%	28,2%
30.	Kota Magelang	16,2%	16,5%	16,1%
31.	Kota Surakarta	18,4%	17,7%	17,2%
32.	Kota Semarang	18,9%	18,5%	18,1%
33.	Kota Pekalongan	19,9%	19,1%	18,5%
34.	Kota Salatiga	16,8%	16,5%	16,2%
35.	Kota Tegal	19,9%	20,2%	19,2%

Sumber: <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev/index/5>

Dapat dilihat dari data tersebut dapat terlihat bahwa jumlah *stunting* di Kabupaten Boyolali meningkat dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Dalam hal ini, pimpinan daerah Kabupaten Boyolali menggerakkan seluruh *stakeholders* lintas program dan lintas sektor untuk menekan angka peningkatan *stunting* di Kabupaten Boyolali yang di atur dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2020 tentang pencegahan *stunting* di Kabupaten Boyolali. Dalam upayanya menangani kasus *stunting* di Kabupaten Boyolali, Dinas Kesehatan sebagai *Leading agency* di bantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah dibentuk.

Adapun OPD yang bertugas dalam upaya menurunkan angka *stunting* di Boyolali adalah Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) yang bertugas membantu koordinasi dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan angka *stunting*, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yang bertugas mengoordinasikan dan menyinergikan penyelenggaraan percepatan

penurunan *stunting*, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) yang bertugas dalam mengawasi dan mengoordinasikan penyelenggaraan percepatan penurunan angka *stunting*. Selanjutnya, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang di bentuk di seluruh daerah di Kabupaten Boyolali, seluruh jajaran Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Didukung oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). TP-PKK adalah sebuah organisasi kemasyarakatan desa yang diharapkan menjadi wadah potensial atau motor penggerak pembangunan khususnya dalam hal pemberdayaan keluarga sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan. Sebagai organisasi yang berbasis kepada keluarga, kegiatan TP-PKK banyak memberi manfaat. Baik kegiatan yang bersifat sosial maupun kegiatan lainnya seperti penyantunan kepada keluarga kurang mampu dan lansia.

TP-PKK merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan (Rofi'i 2010). keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Kesejahteraan keluarga secara langsung mempengaruhi

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan masyarakat sejahtera harus dimulai dengan mensejahterakan setiap keluarga.

TP-PKK memiliki peran penting dan merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang terlaksananya program TP-PKK. TP-PKK ini memiliki sepuluh program pokok. Sepuluh program pokok tersebut terdiri atas penghayatan, pengalaman pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan, tata laksana rumah tangga, pendidikan, keterampilan dan perencanaan sehat. Dalam rangka melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan fasilitasi sepuluh program pokok PKK tersebut dilakukan oleh empat kelompok kerja (Pokja). Keempat Pokja itu adalah Pokja I, Pokja II, Pokja III, Pokja IV (Wahyu 2018).

TP-PKK dibagi menjadi 4 kelompok kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing yaitu; POKJA I (bidang penghayatan, pengamalan pancasila, dan bidang gotong royong). POKJA II (bidang pendidikan, keterampilan, dan bidang pengembangan kehidupan berkooperasi). POKJA III (bidang pangan, sandang dan bidang perumahan dan tatalaksana rumah tangga). Dan yang terakhir POKJA IV (bidang kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan bidang perencanaan sehat). Melihat pembagian tugas kelompok kerja tersebut, dalam menjalankan program mengentaskan angka *stunting*, POKJA IV memiliki tanggung jawab yang besar.

Tiap ketua Pokja mempunyai tugas sebagai berikut: (1) Melaksanakan tugas dan fungsi tiap-tiap Pokja mengembangkan ide-ide atau program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. (2) Menyampaikan informasi kepada ketua umum, para ketua, sekretaris umum, tentang program dan kegiatan yang secara teknis fungsional menjadi tugas dan tanggung jawab tiap-tiap pokja. (3) Menyampaikan saran dan atau laporan perkembangan kegiatan kepada ketua umum. (4) Melakukan fungsi koordinasi antar pokja. (5) Melakukan tugas-tugas tertentu yang dilakukan ketua umum atau para ketua (Rofi'i 2010). Sebagai bentuk implementasi dari semua program kerja dan tugas tiap pokja, TP-PKK memiliki peran melakukan perencanaan, pembinaan, dan fasilitator dalam mengatasi *stunting* di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.

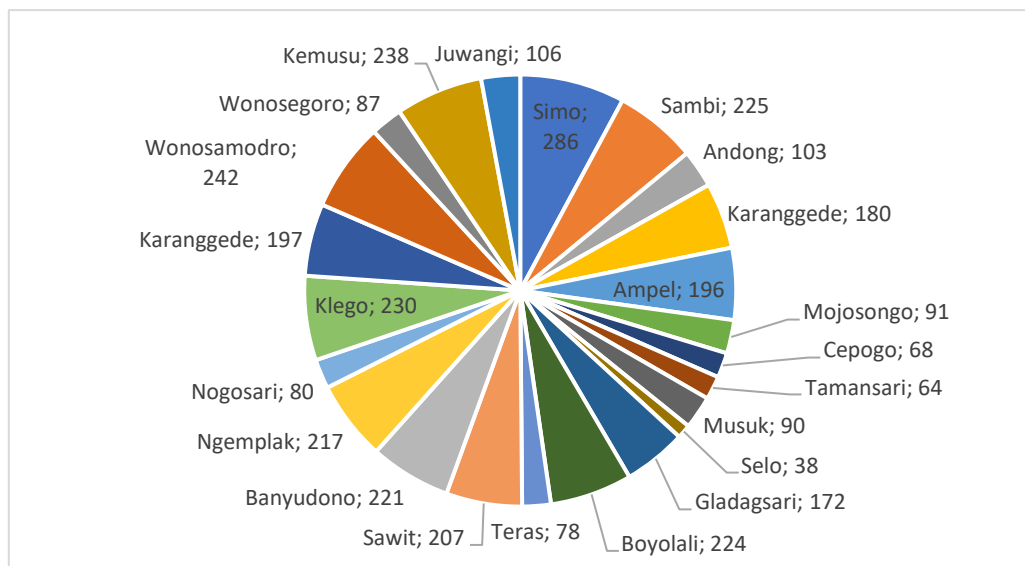
Kecamatan Simo sendiri merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Boyolali yang sudah dibentuk TP-PKK didalam nya untuk mengentaskan angka *stunting* pada anak. TP-PKK Kecamatan Simo memiliki program perencanaan sehat baik untuk balita, anak-anak, remaja, ibu hamil dan menyusui, serta lansia terutama perencanaan pencegahan *stunting*. Salah satu program yang harus dilaksanakan oleh TP-PKK Kecamatan Simo ini adalah memberikan pembinaan atau penyuluhan mengenai *stunting* dan pengecekan tumbuh kembang anak secara rutin yang dilakukan setiap bulan nya ke desa-desa yang berada di Kecamatan Simo. Hal ini diatur dalam Keputusan Camat Simo Nomor: 003/6.11/Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagai bidang koordinasi yang bertugas mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan,

komunikasi, informasi dan edukasi, kerjasama kelompok dan sebagai fasilitator bagi masyarakat.

Namun dalam pelaksanaanya ditemukan berbagai persoalan mengenai peran TP-PKK Kecamatan Simo dalam menangani masalah stunting, yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang bertugas menangani penanggulangan stunting. Selain itu dalam proses penanganan stunting respon yang lambat juga masih ditemukan seperti kader yang tidak tanggap dalam memberikan pertolongan dan pemantauan pada anak yang sudah memiliki gejala stunting.

Dengan begitu, peran yang dilakukan oleh TP-PKK di Kecamatan Simo ini belum bisa dikatakan maksimal karena angka *stunting* di Kecamatan Simo sendiri juga masih tinggi. Data yang diperoleh dari laman TPPS menunjukkan bahwa TP-PKK kecamatan Simo belum menjalankan peran nya dengan baik.

Gambar 1.2 Angka *stunting* di tiap Kecamatan Kabupaten Boyolali Tahun 2023



Sumber: <https://dp2kbp3a.boyolali.go.id/stuntingdist>

Dalam diagram tersebut menggambarkan bahwa angka *stunting* di Kecamatan Simo memiliki kasus *stunting* paling tinggi. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menurunkan angka *stunting* guna menuwudkan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 mendatang. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“PERAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) DALAM UPAYA MENURUNKAN ANGKA *STUNTING* PADA ANAK DI KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI”**

1.2. Identifikasi Masalah

1. Tingginya angka *stunting* di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.
2. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali sebagai organisasi yang memiliki peran penting dalam menurunkan angka *stunting* belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran TP-PKK dalam upaya menurunkan tingginya angka *stunting* pada anak di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali?
2. Apa saja faktor penghambat peran TP-PKK dalam upaya menurunkan tingginya angka *stunting* pada anak di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran TP-PKK dalam upaya menurunkan tingginya angka *stunting* pada anak di Kecamatan Simo.

2. Menganalisis faktor penghambat peran TP-PKK dalam upaya menurunkan angka *stunting* pada anak di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu politik sebagai sumbangan untuk Kabupaten Boyolali, Khususnya Kecamatan Simo.

2. Secara Praktis

- a. Bagi instansi

Memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah Kecamatan Simo dalam mengatasi permasalahan *stunting* terutama TP-PKK Kecamatan Simo dalam mengambil keputusan dan menjalankan tupoksi yang berhubungan dengan kasus *stunting* di Kecamatan Simo.

- b. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan mengenai peran TP-PKK dalam upaya menurunkan angka *stunting* pada anak di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.

1.6.Kajian Pustaka

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2 Penelitian terdahulu

No	Identitas Jurnal	Metode	Hasil	Persamaan/perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
1	Judul: Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mensosialisasi Program Kesehatan di Desa Sepukur Kecamatan Lantun Penulis: Fitriani, Apriani dan Ofi Hidayat Tahun: 2021	Kualitatif	Kajian tersebut menghasilkan beberapa temuan bahwa PKK melakukan empat kegiatan untuk meningkatkan kesehatan, yaitu peningkatan budaya hidup sehat dan bersih (PHBS), POSYANDU, pelaksanaan Sistem Monitoring Masalah Posyandu (SIP) dan Program KB. Dalam melaksanakan program kesehatan, gerakan PKK menggunakan teori struktur fungsi dengan empat sistem: adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Dengan menggunakan keempat sistem tersebut, kader PKK mampu berperan dalam pencapaian kualitas kesehatan di Desa Sepukur.	Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti ajukan yaitu terletak pada objek penelitian yaitu Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK) sebagai fasilitator dalam penanganan <i>stunting</i> . Sementara itu, perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang peneliti ajukan adalah program kesehatan yang menjadi fokus penelitian terdahulu dan juga pemilihan lokasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa penulisan ini akan berbeda dari penulisan jurnal terdahulu
2	Judul: Pencegahan <i>stunting</i> melalui pemberdayaan Kader PKK Kecamatan	Kualitatif	Pelatihan yang dilakukan efektif dalam meperluas wawasan pengetahuan dan juga keterampilan para pelaksana PKK dalam melakukan pengukuran antropometri. Hal ini penting untuk mencegah	Persamaan penelitian terdapat pada objek penelitiannya yaitu pencegahan <i>stunting</i> .

No	Identitas Jurnal	Metode	Hasil	Persamaan/perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
	Barebbo di Kabupaten Bone Penulis: Citra kesumasari, dkk Tahun: 2020		keterbelakangan pertumbuhan pada si kecil. PKK diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap status anak di bawah usia 5 tahun di masyarakat.	Sedangkan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada lokasi penelitian.
3	Judul: Peran Ibu PKK dalam menurunkan laju <i>stunting</i> Penulis: Putri Auliya, dkk. Tahun: 2023	Kualitatif	proses kolaborasi dalam penanganan <i>stunting</i> berjalan dengan cukup baik. Hal itu ditandai dengan adanya penurunan jumlah <i>stunting</i> di wilayah UPTD Puskesmas Ciampel.	Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek penelitiannya, yaitu pelaksanaan <i>collaborative governance</i> sedangkan perbedaan pada penelitian yang diajukan dengan penelitian terdahulu adalah berfokus pada proses kolaborasi antara UPTD puskesmas Ciampel dengan pemerintah dan CSR pada penelitian terdahulu.
4	Judul: pemberdayaan kelompok ibu PKK Desa Bresela dalam peningkatan pengetahuan gizi seimbang untuk pencegahan <i>stunting</i>	Kualitatif	a. PKK memberdayakan masyarakat melalui konseling gizi untuk mencegah <i>stunting</i> di Desa Bresela. b. Peningkatan signifikan dalam pengetahuan mitra PKK setelah sesi pendidikan.	Kesamaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu pada peran PKK dalam mengatasi <i>stunting</i> sedangkan untuk perbedaan adalah pemilihan lokasi.

No	Identitas Jurnal	Metode	Hasil	Persamaan/perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
	Penulis: Anak Agung Gede Budhitresna Tahun: 2022			
5	Judul: Peran program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pembedayaan Perempuan di Kecamatan Telaga Penulis: Nikma Wahyuni Hanis dan Atika Marzaman Tahun: 2019	Kualitatif	pelaksanaan program PKK Kecamatan Telaga telah berhasil memberdayakan masyarakat. Keberhasilan yang telah dirasakan oleh anggota PKK, keluarga dan masyarakat ini tentunya dengan adanya dukungan dan keterlibatan aktif dari instansi terkait di tingkat kecamatan. Serta atas adanya pembinaan langsung oleh pengurus TP PKK Kabupaten Gorontalo kepada TP PKK Kecamatan hingga ke Desa.	Kesamaan penelitian dengan yang diajukan peneliti terletak pada objeknya yaitu peran yang dilakukan oleh PKK Sementara itu perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan masalah dari penelitian yang akan peneliti teliti.
6	Judul: Peran Dinas Sosial Kota Manado dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas	Kualitatif	Dinas Sosial Kota Manado dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat disabilitas yang diamna peranan tersebut terdiri atas peran fasilitatif, peran edukatif, dan peran teknis telah berperan cukup baik akan tetapi belum maksimal. Kurang optimalnya peran Dinas	Persamaannya yaitu metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dan sama-sama menerapkan teori peran dari Jim Iff dan Frank Tesoriero sebagai indikator peran. Sedangkan Perbedaannya yaitu terletak pada lokus penelitian dimana penelitian yang penulis lakukan yaitu TP-PKK Kecamatan Simo

No	Identitas Jurnal	Metode	Hasil	Persamaan/perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
	Penulis: Baturangka Theresia Tahun: 2019		Sosial Kota Manado dalam hal ini ditunjukkan melalui ketidakmerataan pelatihan beserta bantuan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas, dimana masih banyak penyandang disabilitas yang belum terberdayakan secara baik.	Kabupaten Boyolali. Perbedaan kedua yaitu masalah yang di teliti.
7	Judul: Peran <i>Stakeholder</i> dalam percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kelurahan Tanjung mas Kota Semarang Penulis: Lusiana Wardhani, Maesaroh, dan Nina Widowati Tahun: 2023	Kualitatif	Pada percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kelurahan Tanjung Mas terdapat enam stakeholder. Dilihat berdasarkan perspektif governance, stakeholder negara terdiri dari Dinas Kesehatan, Puskesmas Bandharharjo, dan Kelurahan Tanjung Mas. Stakeholder masyarakat (civil society) terdiri dari masyarakat dan posyandu. Adapun stakeholder swasta yaitu PT PLN Indonesia Power Semarang. Dilihat dari perannya, enam stakeholder tersebut dikelompokkan menjadi lima jenis peran. Peran stakeholder dalam program percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kelurahan Tanjung Mas, terdapat dua faktor yang menjadi penghambat program percepatan penurunan Kelurahan Tanjung <i>stunting</i> Mas. di Faktor penghambat pertama yaitu komunikasi antar stakeholder masih belum dapat dilakukan dengan baik. Pernyataan tersebut	Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti ajukan yaitu peran stakeholder menjadi objeknya. Sedangkan perbedaan pada penelitian terdahulu lokasi yang akan di teliti.

No	Identitas Jurnal	Metode	Hasil	Persamaan/perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
			dibuktikan dengan hadirnya konflik konflik horizontal antar stakeholder. Faktor penghambat kedua yaitu sumber kebijakan karena terdapat ketidakjelasan mengenai peran stakeholder dalam kebijakan dibuktikan dengan temuan wawancara bahwa terdapat stakeholder yang tidak tahu peran mereka dan hanya mengikuti perintah dari Dinas Kesehatan.	
8	Judul: Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pencegahan <i>stunting</i> . Penulis: Bastian Rahmadi Tahun: 2021	Kualitatif	peran PKK adalah mendorong perubahan untuk memberdayakan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu <i>stunting</i> . Ada intervensi sensitif, meskipun secara tidak langsung, yang memberikan kontribusi cukup signifikan hingga mencapai 70% untuk mencegah <i>stunting</i> . Program atau kegiatan intervensi sensitif berupa penyuluhan dan sosialisasi kesehatan ibu dan anak, ditambah dengan penggunaan praktik pengasuhan anak yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak.	Kesamaan penelitian dengan yang diajukan peneliti terletak pada objeknya yaitu peran PKK dalam pencegahan <i>stunting</i> . Sementara itu, perbedaan penelitian terdahulu dengan yang peneliti ajukan adalah kegiatan atau program intervensi spesifik dan sensitive dalam upaya yang dilakukan bertujuan untuk menurunkan kasus <i>stunting</i> sebagai fokus dari penelitiannya
9	Judul: Pemberdayaan Masyarakat Dalam penanggulangan	Kualitatif	pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan <i>stunting</i> (gangguan pertumbuhan anak) di desa pancasila kecamatan natar Lampung Selatan yaitu melalui beberapa tahapan yaitu tahapan	Penelitian ini disusun untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa kepada penderita. Sedangkan pada penelitian yang peneliti tulis ini dipilih karena ingin

No	Identitas Jurnal	Metode	Hasil	Persamaan/perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
	<i>Stunting</i> (Gangguan Pertumbuhan Pada Anak) di Desa Pancasila Kecamatan Natar Lampung Selatan) Penulis: Febi Rama Silpia Tahun: 2019		penyadaran dengan sosialisasi, tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, dengan memberikan pelatihan pelatihan dan yang terakhir tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inisiatif untuk mengantar pola kemandirian, masyarakat sudah mandiri tidak dapat dibiarkan begitu saja. Masyarakat tetap memerlukan perlindungan, yaitu dengan dipantau posyandu. Pembinaan terhadap masyarakat dikatakan berhasil, karena dengan adanya program tersebut penderita <i>stunting</i> di desa pancasila dari 30 orang di tahun 2017 sekarang menjadi 12 orang, dan masyarakat sudah mengerti tentang gaya hidup sehat. Persamaannya dengan penelitian yang peneliti tulis yaitu fokus pada penanggulangan <i>stunting</i>. Perbedaananya,	mengetahui bagaimana peran PKK dalam mengatasi <i>stunting</i> anak di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali
10	Judul: Upaya Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah	Deskriptif Kualitatif	pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan <i>stunting</i> di Kabupaten pesisir selatan terkhusus di kenagaraan kembang barat.	Perbedaan penelitian yang ditulis ini mendeskripsikan bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah <i>stunting</i>. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti tulis

No	Identitas Jurnal	Metode	Hasil	Persamaan/perbedaan dengan penelitian yang dilakukan
	<i>Stunting</i> Pada Anak Balita Penulis: Draiy Putri Pratama, Sari, dan Maria Montessori Tahun: 2021			membahas kepada peran PKK dalam menanggulangi <i>stunting</i>. Selain itu pemilihan lokasi juga menjadi perbedaan dalam penulisan ini.

Sumber: Diolah penulis

Tabel 1.2 tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian serta membantu untuk menunjukkan keaslian dari penelitian. Pada tabel tersebut mencantumkan persamaan yakni pembahasan mengenai peran TP-PKK dalam mengatasi *stunting* sedangkan untuk perbedaan penelitian yang akan peneliti teliti dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu adalah pemilihan lokasi penelitian.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Bastian Rahmadi (2021) dengan judul Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pencegahan *stunting* dengan hasil ditemukannya adanya intervensi sensitif, meskipun secara tidak langsung, yang memberikan kontribusi cukup signifikan hingga mencapai 70% untuk mencegah *stunting*. Program atau kegiatan intervensi sensitif berupa penyuluhan dan sosialisasi kesehatan ibu dan anak, ditambah dengan penggunaan praktik pengasuhan anak yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

Mengacu dari penelitian sebelumnya tersebut, penelitian yang akan peneliti lakukan ini akan meneliti sejauh mana peran yang sudah dilakukan oleh TP-PKK Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali dalam mengatasi angka *stunting* yang tinggi di Daerah tersebut.

1.6.2. Manajemen Publik

Manajemen publik adalah sebuah kumpulan dari sebuah gabungan fungsi manajemen dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik,

informasi, dan politik dan merupakan sebuah studi interdisipliner dari beberapa aspek umum organisasi (Overman, 2004). Dalam manajemen publik kegiatan yang dilakukan lebih memfokuskan administrasi publik dijadikan profesi sedangkan manajer sebagai seorang praktisi dari profesi, fokus kegiatan manajemen publik lebih ke sektor pelaksanaan internal organisasi pemerintah atau organisasi non-profit dan fokusnya tidak mengintensifkan operasi kegiatan dengan organisasi publik lainnya seperti legislatif atau peradilan.

Manajemen publik dapat pula diartikan sebagai salah satu cabang keilmuan dari administrasi publik yang dimana membahas mengenai manajemen sumberdaya, organisasi, evaluasi program keuangan, informasi, dan ilmu-ilmu mengenai manajemen. Pengertian manajemen publik tersebut dapat juga dipahami sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya melalui pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan manajemen publik yang mampu melayani masyarakat secara maksimal.

Jika mengacu pada permasalahan penelitian ini yaitu tingginya angka *stunting* pada anak di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, tentunya perlu melihat peran OPD yang berkecimpung dalam menangani hal tersebut. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) merupakan salah satu organisasi yang berperan penting dalam penanganan kasus *stunting* di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali. Dalam hal ini diperlukan pengelolaan organisasi

yang baik dan optimal untuk menangani kasus *stunting* pada anak di Kecamatan Simo.

1.6.3. Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia sudah dapat dikatakan menjalankan sebuah peran (Soekanto, 2001). Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan.

Teori peran adalah konsep dalam ilmu sosial yang mengacu pada harapan-harapan yang ada dalam suatu posisi sosial tertentu. Berbagai ahli telah mengembangkan teori ini dengan perspektif dan penekanan yang berbeda. Berikut adalah beberapa pandangan ahli mengenai teori peran:

1. Ralph Linton

Ralph Linton mengartikan peran sebagai ekspresi dinamis dari status. Seorang individu menduduki status tetapi melaksanakan peran. Norma-norma budaya kita mengajarkan bahwa orang yang menduduki status tertentu harus bertindak seturut harapan

masyarakat dari status itu. Seorang ayah misalnya, harus bertingkah laku sebagaimana diharapkan masyarakat dari seorang ayah, yakni mencari nafkah untuk keluarga, mencintai anak-anaknya, mengusahakan masa depan yang baik bagi anak-anaknya, dan seterusnya. Demikianpun peran ibu dan peran-peran lain di dalam masyarakat. Oleh karena itu individu didalam masyarakat bisa memiliki beberapa status sekaligus (*status set*) maka tidaklah mengherankan kalau setiap individu juga mempunyai beberapa peran yang berbeda-beda pada waktu yang sama (Bernard Raho, 2016:86).

2. Talcott Parsons

Parsons mengembangkan konsep ini lebih lanjut dalam kerangka teori fungsionalisnya. Ia melihat peran sebagai unit dasar dalam struktur sosial yang membantu menjaga stabilitas dan integrasi sosial. Menurut Parsons, setiap peran memiliki serangkaian norma yang harus diikuti untuk menjaga keseimbangan sistem sosial. Peran, dalam pandangan Parsons, adalah kunci untuk memahami bagaimana individu menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial dan bagaimana mereka berkontribusi pada fungsi keseluruhan masyarakat (Ismail, 2012:67-84).

3. Erving Goffman

Goffman memperkenalkan pendekatan dramaturgis dalam teori peran. Ia memandang interaksi sosial seperti drama di atas panggung,

di mana individu memainkan peran di hadapan penonton. Dalam bukunya *"The Presentation of Self in Everyday Life,"* Goffman menjelaskan bagaimana orang mengelola kesan yang mereka berikan kepada orang lain melalui penampilan dan perilaku mereka. Peran, dalam pandangan Goffman, adalah bagian dari "manajemen kesan" yang dilakukan individu dalam interaksi sehari-hari (Goffman, 2003).

4. George Herbert Mead

Menurut George Herbert Mead dalam (Littlejohn & Foss, 2009) memandang peran sebagai bagian penting dari proses sosial di mana individu membangun identitas mereka. Dalam pandangannya, melalui interaksi dengan orang lain dan melalui proses bermain peran (*role-taking*), individu belajar untuk memahami perspektif orang lain dan mengembangkan konsep diri mereka. Peran membantu individu untuk menginternalisasi norma dan nilai sosial serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

5. Robert K. Merton

Merton mengembangkan konsep "set peran" (*role set*), yang mengacu pada serangkaian peran yang berkaitan dengan satu status tertentu. Misalnya, seorang guru mungkin memiliki peran sebagai pendidik, peneliti, dan mentor. Merton juga membahas konflik peran (*role conflict*), yang terjadi ketika harapan dari berbagai peran yang berbeda bertentangan satu sama lain.

6. Biddle dan Thomas

Menurut Biddle dan Thomas dalam Aco Musaddad (2018:31) teori peran di klasifikasikan ke dalam empat golongan yaitu:

- a. Sejumlah orang yang berperan aktif dalam berinteraksi pada lingkungan sosialnya.
- b. Perilaku yang timbul pada saat proses interaksi tersebut berlangsung.
- c. Status orang tersebut dalam berperilaku.
- d. Hubungan antara orang dan perilaku.

7. Jim Ife dan Frank Tesoriero

Teori Jim Ife dan Tesoriero (2008:558-613) adalah salah satu kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk memahami peran serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan implementasi program-program pembangunan, termasuk dalam konteks penanggulangan masalah kesehatan seperti *stunting*. Terdapat beberapa indikator peran yang harus dimiliki oleh kelompok atau individu antara lain:

a. Peran fasilitatif

Peran fasilitatif merupakan peran yang dicurahkan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui dan menghargai kontribusi dan kerja yang dimiliki oleh individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Membangun kesepakatan dengan sesama pihak

untuk melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan potensi individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat. Menurut Jim Ife dalam peran fasilitatif terdapat tujuh peran khusus, yaitu animasi sosial, mediasi dan negoisasi, pemberian dukungan, membentuk konsensus, fasilitator kelompok, pemanfaatan sumberdaya dan mengorganisasi.

b. Peran edukasional

TP-PKK memainkan peran sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang terlaksananya program TP-PKK sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan proses penanganan *stunting* akan tetapi lebih berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan bagi individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat. Peran pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran, memberikan informasi mengenai bahaya *stunting*, melakukan pelatihan individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat dalam pemberian gizi yang cukup pada anak.

c. Peran representatif

TP-PKK melakukan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan bagi kepentingan individu-individu, kelompok-kelompok, yang berada didalam masyarakat. Peranan ini

dilakukan, antara lain dengan mendapatkan sumber-sumber dari luar tetapi dengan berbagai pertimbangan yang matang, dan pelatihan pemberian gizi yang cukup untuk anak *stunting*. Melakukan advokasi untuk membela kepentingan-kepentingan individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat seperti mendukung upaya implementasi program dan berupaya merealisasikan program tersebut. Lalu juga memanfaatkan media masa untuk memperkenalkan hasil kinerja.

Selain itu juga bertujuan menerima dukungan dari pihak lain yang lebih luas dengan berbagai pihak atau kelompok dan berupaya mendorong mereka untuk turut serta dalam upaya pencegahan *stunting*, seperti pemerintah, pengusaha, dan masyarakat selain itu pula, TP-PKK dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan *stakeholders* lainnya.

d. Peran Teknis

Kemampuan TP-PKK dalam melakukan pengumpulan dan analisis data, kemampuan menggunakan komputer, kemampuan melakukan presentasi secara verbal maupun tertulis, manajemen serta melakukan pengendalian finansial, dan melakukan *need assessment* terhadap usahanya dalam mencegah *stunting*. Peran-peran ini dapat dilakukan TP-PKK bersama individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat mendapatkan informasi dan data yang dapat digunakan baik untuk mengundang

perhatian dari *stakeholders* lain atau untuk bekerjasama dalam menjalankan program mencegah *stunting*. Dengan demikian, TP-PKK memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan *stunting* pada anak.

Dari teori-teori yang sudah disebutkan di atas, peneliti memilih teori yang dikemukakan oleh Jim Ife dan Tesoriero (2008:558-613) dimana dalam teori ini memiliki indikator peran yang harus dimiliki oleh kelompok organisasi yang menjadikan tujuan proses pencapaian tujuan organisasi tidak melenceng dari rencana yang telah ditetapkan.

1.6.4. Faktor penghambat peran

Faktor penghambat dalam menjalankan suatu peran baik itu peran yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi sekalipun pasti selalu ada. Faktor penghambat pada umumnya akan menjadi kendala dalam menjalankan suatu peran yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Menurut Deby (2019), faktor penghambat peran tersebut adalah:

1. Kesadaran Masyarakat

Menurut Widjaja (1984:46) menyatakan bahwa “kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf dan yakin tentang kondisi tertentu”. Kesadaran masyarakat lahir dari masyarakatnya itu sendiri yang lahir dari kebiasaan dalam masyarakat, dipengaruhi oleh lingkungan, peraturan-peraturan dan peranan pemerintahnya.

Kesadaran dan kapasitas masyarakat yang belum memadai dalam meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam menurunkan angka *stunting*. Selama ini meningkatnya angka *stunting* disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi yang baik bagi keturunannya. Kondisi seperti ini harus segera diubah dengan memberikan sosialisasi dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai bentuk peningkatan peran serta masyarakat dalam hal menurunkan angka *stunting*.

2. Pengadaan sarana dan prasarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Dalam upaya menurunkan angka *stunting*, sarana dan prasarana merupakan aspek penting yang harus tersedia. Terlebih sarana dan prasarana untuk menunjang upaya menurunkan angka *stunting*. untuk itu diperlukan peralatan yang memadai dan sesuai dengan rekomendasi kementerian kesehatan.

1.6.5. Upaya menurunkan angka *stunting*

Upaya menurunkan angka *stunting* melibatkan serangkaian upaya preventif dan intervensi meliputi peningkatan kesadaran dan Pendidikan mengenai pentingnya gizi yang seimbang dan asupan makanan yang

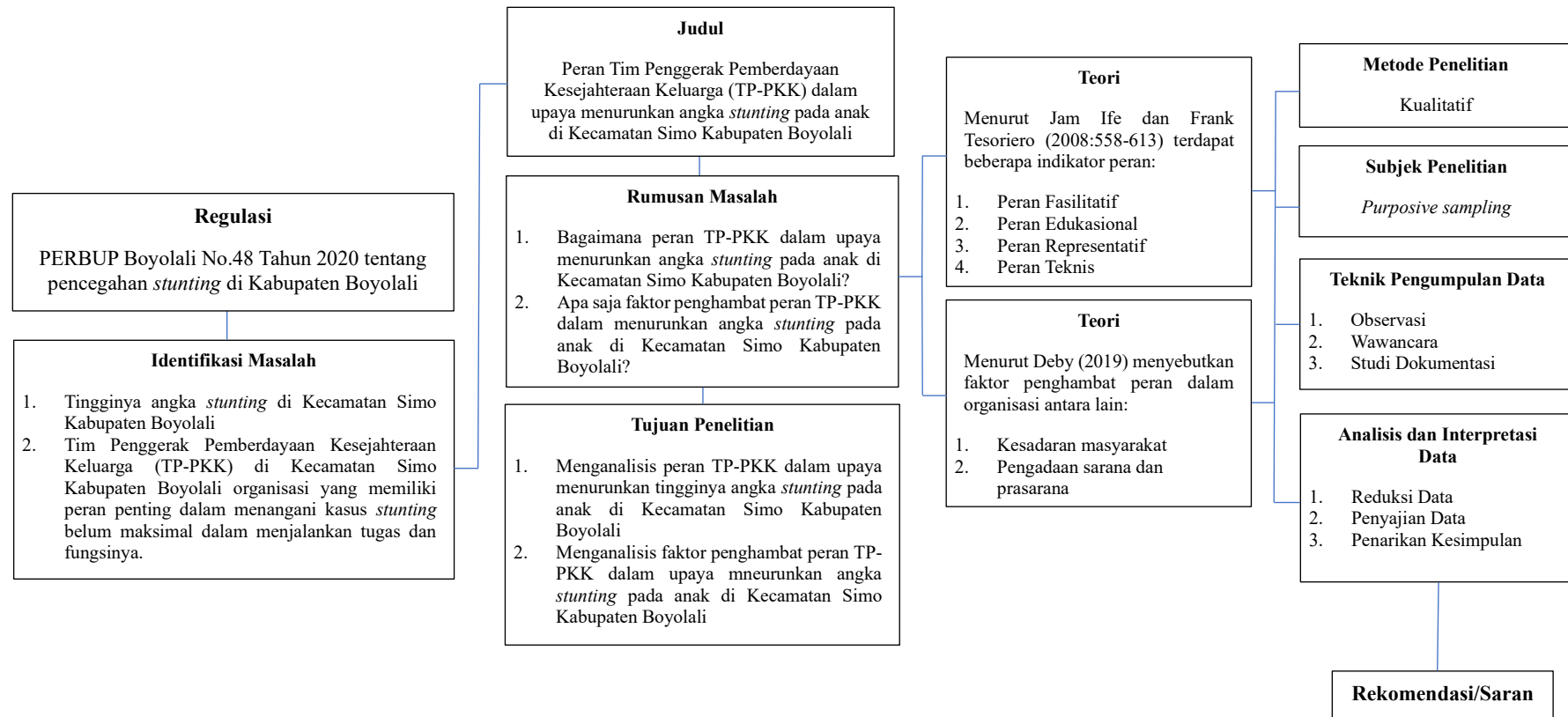
baik untuk pertumbuhan anak. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye penyuluhan gizi, program-program Pendidikan bagi ibu hamil dan ibu menyusui, serta upaya untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi.

Meskipun faktor genetika memiliki peran dalam tinggi badan anak. Faktanya faktor genetika memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan seseorang dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan. Biasanya *stunting* mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia dua tahun. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penanggulangan *stunting* yaitu dengan cara mencegah terjadinya dahulu, pasalnya banyak anak di Indonesia yang sudah terinfeksi *stunting*.

Pihak kementrian kesehatan menegaskan bahwa *stunting* merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat Indonesia. Bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik, anak-anak mengalami gangguan perkembangan otak yang akan memengaruhi kemampuan dan prestasi pada anak. Selain itu anak yang menderita *stunting* akan memiliki riwayat kesehatan yang buruk karena daya tahan tubuh yang buruk. *Stunting* juga bisa menurun ke generasi berikutnya bila tidak ditangani dengan serius

1.7.Kerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran Penelitian



1.8.Operasional Konsep

1.8.1. Peran

Peran dalam penelitian ini adalah perilaku individu-individu dalam organisasi dimana individu-individu tersebut menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan atau jabatan yang dapat diukur melalui:

1) Peran Fasilitatif

Peran Fasilitatif dalam upaya menurunkan angka *stunting* dapat diartikan sebagai fungsi TP-PKK dalam memfasilitasi berbagai aktivitas dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan nutrisi anak, antara lain:

- a. Memberikan fasilitas yang memadai bagi masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak terkena *stunting*.
- b. Memberikan upaya dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat mengenai bahaya *stunting*.
- c. Memberikan program-program yang mendukung upaya penurunan angka *stunting*.

2) Peran Edukasional

Peran ini mengacu pada fungsi TP-PKK sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi dan kesehatan dalam mencegah *stunting*.

- a. Memberikan pengetahuan mengenai upaya penanganan *stunting*.

b. Pemberian informasi terkait bahaya *stunting*.

3) Peran Representatif

Peran ini mengacu pada fungsi TP-PKK sebagai wakil atau perwakilan masyarakat dalam advokasi dan penyampaian aspirasi terkait masalah *stunting* kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah dan lembaga kesehatan. Dengan peran representatif, TP-PKK berkontribusi dalam membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif antara masyarakat dan pengambil kebijakan, serta memastikan bahwa program-program penanggulangan *stunting* yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

a. Menjalin kerjasama dengan pihak lain yang berwenang dalam mengatasi masalah *stunting*.

4) Peran Teknik

Peran ini mengacu pada fungsi TP-PKK dalam menerapkan pendekatan terhadap kemampuan kader dalam mengatasi masalah *stunting* yang terukur dan efektif.

a. Kemampuan kader dalam menangani masalah *stunting*.

1.8.2. Faktor Penghambat Peran

Indikator faktor penghambat peran dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

1) Kesadaran Masyarakat

Mengacu kepada pemahaman, kepedulian serta kesadaran masyarakat terhadap isu *stunting* dan pentingnya gizi dan kesehatan bagi anak-anak.

- a. Kebiasaan masyarakat mempengaruhi gizi pada anak.
- b. Kepedulian masyarakat terhadap gizi yang dibutuhkan anak.

2) Sarana dan prasarana

Merujuk pada pentingnya pengadaan infrastuktur dalam upaya menurunkan angka *stunting*.

- a. Urgensi pengadaan sarana dan prasarana dalam upaya menurunkan angka *stunting*.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.

1.9. Metode Penelitian

Menurut Sukmadinata (2010:52), metode penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar pandangan-pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan, dan isu-isu yang dihadapi. Suatu penelitian mempunyai rancangan penelitian (*research design*) tertentu. Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang harus di tempuh, waktu penelitian, sumber data dan kondisi dari data yang dikumpulkan, serta dengan cara bagaimana data tersebut diambil dan diolah. Tujuan dari rancangan penelitian adalah melalui penggunaan metode penelitian yang tepat, dirancang kegiatan yang dapat memberikan jawaban yang dapat di teliti terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Dengan demikian melalui penelitian deskriptif ini, peneliti hanya berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ada kaitanya dengan Peran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam upaya menurunkan angka *stunting* pada anak di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.

1.9.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menemukan fakta dan menginterpretasikan tentang “Peran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam upaya menurunkan angka *stunting* pada anak di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali” untuk melukiskan secara akurat mengenai peran TP-PKK di Kecamatan Simo.

1.9.2. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi yang dipilih adalah Kecamatan Simo dimana angka *stunting* yang diperoleh dari laman DP2KBP3A di Kecamatan Simo paling tinggi dibandingkan Kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Boyolali.

Situs penelitian yaitu tempat dimana seharusnya peneliti menangkap objek dari yang diteliti. Situs dari penelitian ini adalah TP-PKK di Kecamatan Simo.

1.9.3. Subjek Penelitian

Sejumlah individu yang menyampaikan informasi yang diperlukan untuk kepentingan penelitian yaitu subjek penelitian. Sumber informasi nantinya didapatkan melalui subjek penelitian terkait situasi dan kondisi di lokasi penelitian. Penentuan subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan menerapkan metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011:85) *purposive sampling* ialah teknik yang dapat diaplikasikan apabila hendak menentukan sampel dengan menerapkan sejumlah kriteria tertentu. Kriteria yang dipertimbangkan contohnya pada seseorang yang dirasa dapat memberikan sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian atau dapat dikatakan sebagai teknik dalam menghimpun sampel penelitian sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Adapun subjek dari penelitian ini adalah ketua umum TP-PKK Kecamatan Simo, Ketua Pokja IV sekaligus kader PKK, Orang tua yang memiliki anak terindikasi *stunting*, dan Ibu Hamil.

1.9.4. Jenis Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam proses pelaksanaan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari pendapat narasumber melalui wawancara. Data sekunder adalah informasi yang penulis peroleh berupa data dari TP-PKK yang berperan dalam upaya menurunkan angka *stunting* pada anak di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan saksama. Kegiatan observasi bertujuan mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun pengumpulan data menggunakan teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu observasi partisipasi (*participant observation*) dan observasi nonpartisipasi (*nonparticipan observation*) (Farida, 2016: 68).

Secara teori, metode ini didefinisikan sebagai pengamatan dan pencatatan fenomena yang diteliti secara sistematis. Penulis mengamati perilaku kader dan karyawan TP-PKK pada beberapa kesempatan untuk mendapatkan hasil observasi yang optimal untuk membantu menurunkan angka *stunting* dengan data yang relevan di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.

2. Wawancara

Peneliti menggunakan metode ini untuk menggali informasi secara langsung dari informan. Penulis akan melakukan wawancara terhadap informan terkait dengan menggunakan teknik wawancara yang terstruktur, wawancara semiterstruktur dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Melalui wawancara maka mendapatkan informasi langsung dari responden yang terdiri dari:

Informan kunci yaitu Ketua TP-PKK yang terlibat dalam kegiatan pencegahan *stunting*, Pihak masyarakat yang memiliki anak terindikasi *stunting* di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumen berguna untuk melengkapi metode sebelumnya yaitu wawancara dalam melakukan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2008), dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan informasi berupa buku-buku, catatan, laporan, teks, dan gambar visual, serta dokumen berupa informasi yang dapat mendukung penelitian. Dokumen-dokumen yang berupa kegiatan-kegiatan atau dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian mengenai peran Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam upaya menurunkan angka *stunting* pada anak di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali.

1.9.6. Analisis dan Interpretasi Data

Proses pengolahan data merupakan proses pembuktian dan penyajian data menjadi informasi yang akurat. Dalam mengolah data kualitatif peneliti dituntut untuk memiliki kemampuan mengumpulkan data, kreativitas, kepekaan mengorganisasikan data secara lengkap, kemampuan menelaah masalah secara mendalam, menafsirkan data secara logis, dan mengungkapkan dalam kalimat yang konsisten serta sistematis, adapun proses pengolahan data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut (Fitri and Haekal, 2021).

1) Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan proses penyederhanaan dan pengkategorian data. Peneliti mulai melakukan refleksi untuk menentukan kategorisasi berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan.

2) Penyajian Data

Pada tahap ini data hasil reduksi dan kategorisasi ditampilkan dalam matrik, natarif, tabel, dan berdasarkan kriteria tertentu. Data data yang telah dikelompokkan dimasukkan berdasarkan kategori yang sesuai untuk mempermudah proses analisis.

3) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yaitu mengambil intisari dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan kalimat yang singkat tetapi mengandung pengertian luas (Dr. Umar Sidiq, M.Ag dan Dr. Moh. Miftachul Choiri 2019).

1.9.7. Kualitas Data

Pemeriksaan kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai alat pembuktian bahwa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dilapangan. Untuk menguji kualitas dan validitas data maka peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan cara menguji kredibilitas.